



## **Analisis Pengelolaan Air Bersih Berbasis Komunitas di Kelurahan Sungai Lekop**

**Rafi Hidayat<sup>1</sup>, <sup>2</sup>Adji Suradji Muhammad, <sup>3</sup>Imam Yudhi Prastya**

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang

Rafihidayat611@gmail.com<sup>1</sup>, Suradji@umrah.ac.id<sup>2</sup>, Yudhiimam@umrah.ac.id<sup>3</sup>

**Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v4i2.3492**

Received: 27 Juli 2020 ; Accepted: 30 November 2020 .; Published: 20 Desember 2020

### **Abstrak**

Permasalahan kesulitan mengakses air bersih di masyarakat pedesaan, membuat pemerintah berupaya untuk mengatasi persoalan air di masyarakat dengan memberikan bantuan fasilitas seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Masyarakat diberikan kewenangan untuk mengelola secara mandiri. Fokus penelitian menganalisis dari pengelolaan air bersih berbasis komunitas di Kelurahan Sungai Lekop khususnya pada program SPAM, dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengeloaannya. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan penelitian 11 orang. Adapun teori yang digunakan dengan empat pendekatan fungsi manajemen dari yaitu tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan yang dianalisis dari nilai-nilai pengembangan komunitas meliputi nilai partisipasi, pemberdayaan, kepemilikan, serta modal sosial Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih berbasis komunitas di Kelurahan Sungai Lekop belum optimal dalam pengeloaannya, ada hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya sehingga belum mampu memberikan peningkatan terhadap kebutuhan air bersih dimasyarakat. Seperti pada tahap planning program berjalan sesuai dengan perencanaannya, pada tahap organizing komunitas belum mampu mengambil keputusan tentang kepengurusan dan biaya tarif. Lalu tahap actuating anggota komunitas kurang mampu berkoordinasi sehingga tidak mampu memecahkan masalah kedepannya. Selanjutnya tahap controlling ketidaktegasan pengawasan dalam program, sehingga pengelola menjadi lalai dalam menjalankan tugasnya.

***Kata Kunci: pengelolaan air bersih; komunitas; sistem penyediaan air minum.***

---

**Abstract**

*The focus of this research is the analysis of Community-Based Water Management in Kelurahan Sungai Lekop specifically on the Bina Desa Water Supply program. This study aims to analyze community-based water management in Kelurahan Sungai Lekop. The researcher used a qualitative method with a descriptive approach and used a purposive sampling technique in selecting informants, so in this study there were 11 informants. This Research use a theory based on four management functions, namely the stages of planning, organizing, actuating and controlling which are analyzed with the values of community development, namely the value of participation, empowerment, ownership, social capital. The results of the study found that community-based water management in Kelurahan Sungai Lekop has been implemented but has not been optimal in its management, there are obstacles that occur in its implementation so that it has not been able to provide an increase in clean water needs in the community. As in the planning stage the program runs according to the plan, at the organizing stage the community has not been able to make decisions about management and tariff fees. At the actuating stage community members are less able to coordinate so that they are unable to solve future problems. At the controlling stage, the supervisors are not strict so that the managers become negligent in their duties. This can be an evaluation of the government in the community empowerment program. So that it gives satisfaction to the community with the success of the objectives achieved. through the programs carried out, it can change people's behavior to become more independent.*

**Keywords : water management; community based; water supply program.**

## PENDAHULUAN

Infrastuktur menjadi salah satu aspek yang penting dalam perencanaan wilayah terutama dalam kontribusinya pada aspek perekonomian, sosial kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan. Mahadiansar et al. (2020) mendefinisikan infrastruktur pada pengembangan paradigma terhadap model pembangunan nasional berorientasi pertumbuhan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia.

Hal yang mendasar salah satunya mengenai pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat sebagai kebutuhan mutlak kehidupan. Air menjadi suatu kebutuhan dasar yang diperlukan oleh manusia, terutama kebutuhan yang digunakan sebagai air minum, mencuci, memasak, mandi dan sanitasi.

Kesulitan untuk mendapatkan air bersih dengan kondisi layak minum menjadi masalah diberbagai tempat seperti halnya diwilayah pedesaan yang sulit terjangkau oleh pelayanan air minum bagi masyarakat. Saat ini pemerintah berupaya untuk mengatasi persoalan air di masyarakat dengan memberikan bantuan fasilitas seperti Sistem Penyediaan Air Minum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/Prt/M/2007 tentang penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. "Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik".

Ketersediaan air terus menurun sementara permintaan air terus meningkat (Santoso. 2015:18). Selanjutnya Yudiatmaja (2020) menjelaskan bahwa proses pengelolaan sumber daya air masyarakat lokal harus dilibatkan dengan menggunakan sudut pandang modal sosial. Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Bintan yang menggunakan akses air bersih berjumlah 131.477 jiwa yang terdiri dari 20.792 unit sarana sumur gali terlindung dengan jumlah pengguna 95.664 jiwa, 18 unit jaringan perpipaan (PDAM dan BP-SPAM) dengan pengguna 35.754 jiwa. Pencapaian ini masih dibawah target RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2014 yaitu 92,5%.

Salah satunya ditemukan diwilayah Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur yang merupakan Kelurahan dengan jumlah penduduk 8843 jiwa dan 2330 KK. Masyarakat tidak terpenuhi pelayanan air minum mencapai angka 84% dengan

kebutuhan minimal 60liter/org/hari untuk kebutuhan mandi, air minum, cuci (KOTAKU Provinsi Kepulauan Riau, 2017) yang beberapa masyarakatnya menggunakan sumur galian dan ada juga yang tidak memiliki sumur. Keterbatasan sumber air ketika musim kemarau berkepanjangan di khawatirkan akan mengalami kekeringan.

Pada tahun 2018 Kelurahan Sungai Lekop mendapatkan program bantuan dari pemerintah Kabupaten Bintan yaitu pengembangan sarana penyediaan air minum dengan nama SPAM Bina Desa. Sarana ini dikelola oleh kelompok masyarakat setempat dan pemerintah desa secara mandiri. Terbentuknya pengurus dalam mengelola air di masyarakat dibentuk oleh pihak Kelurahan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaksana dalam menjalankan SPAM tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal ini dikarenakan dari segi pengelolaan yang dilakukan oleh pelaksana yaitu kelompok masyarakat itu sendiri. Untuk menjawab dari permasalahan yang terjadi, adapun rumusan masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimanana pengelolaan air bersih berbasis komunitas di Kelurahan Sungai Lekop?

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan air berbasis komunitas di Kelurahan Sungai

Lekop dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada pengelolaan air bersih berbasis komunitas di Kelurahan Sungai Lekop.

## **Pengelolaan**

Terry (1973) menjelaskan "*management is performance of conceiving and avhieving desired results by means of group efforts consisting of utilizing human talent and resources*". Proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti material, uang, metode dan pasar untuk mencapai tujuan organisasi. Terry (2010: 9), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).

## **Pengelolaan air berbasis komunitas**

Pengelolaan air berbasis komunitas dalam banyak istilah yang digunakan oleh banyak pihak yang selama ini adalah mendorong akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air. Yaitu akses masyarakat secara mandiri dalam pengelolaan air yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Menurut Dudung Darusman (2000), pengelolaan berbasis masyarakat mengandung arti bahwa masyarakat dengan segala kemampuan yang ada mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Kata basis itu sendiri mengandung makna "alas atau

dasar”, sehingga “berbasis komunitas” dalam pengelolaan sumberdaya air mempunyai makna yang lebih mendalam dari hanya sekedar mewujudkan penyediaan air bagi masyarakat atau melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, melainkan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pengelolaan air.

Sistem berbasis komunitas sangat berperan dalam peningkatan akses terhadap air minum. Dalam rangka meningkatkan akses terhadap air minum, tidak hanya diperlukan investasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga kesediaan masyarakat secara berkelompok untuk melakukan pemenuhan sendiri (*self-supply*) sebagai strategi yang sifatnya sementara (Bisung dkk., 2014).

### **Pengembangan Komunitas (*community development*)**

*Community development* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pengembangan komunitas. Pengembangan komunitas memiliki dua suku kata yaitu “pengembangan” dan “komunitas” dimana keduanya memiliki definisi yang berdiri sendiri. Untuk memahami konsep pengembangan komunitas, langkah awal yang terpenting dapat di mulai dengan memahami konsep komunitas itu sendiri.

Komunitas diartikan sebagai warga setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat lebih

luas (*society*) melalui kepentingan bersama (*a community of interest*) atau tingkat interaksi yang tinggi. Para anggota komunitas mempunyai kebutuhbersama (*common needs*). Jika tidak ada kebutuhan bersama, itu bukan suatu komunitas (Jim Ife, 1995 dalam Nasdian, 2014). Definisi lain tentang komunitas dikemukakan oleh Mattessich dan Monsey (2004) dikutip Phillips dan Pittman (2008) bahwa masyarakat yang bertempat tinggal didalam wilayah geografi dengan batas-batas tertentu dan memiliki ikatan sosial dan psikologi satu dengan yang lain dan dengan tempat dimana mereka tinggal.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti akan memberikan gambaran sistematis dan faktual dan akurat mengenai fakta sesuai ruang lingkup judul penelitian. Sugiyono (2014:11), menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable ataupun lebih tanpa membuat suatu perbandingan, atau menghubungkan satu variable dengan variable lain”.

Metode pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunde. Informan dalam penelitian ini

peneliti tentukan dengan metode *purposive sampling* Sugiyono (2014:218). Teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data yang didapat dari penelitian. Miles dan Huberman (2009:15-12) menyatakan bahwa ada beberapa tahapan dalam menganalisis data kualitatif, antara lain: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Objek dan lokasi penelitian ini ialah pada SPAM Bina Desa yang berlokasi di Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

### Hasil dan Pembahasan

Program Sistem penyediaan air minum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan air minum baik itu perkotaan maupun pedesaan. Program ini untuk membangun serta memfasilitasi air bersih lewat teknologi perpipaan yang disambungkan kerumah-rumah masyarakat yang diwilayahnya belum memiliki sumber air yang layak

**Gambar 1.** SPAM Bina Desa Kelurahan Sungai Lekop



Sumber: Olahan Data Peneliti, (2020)

Dalam kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun dikelola meliputi dari operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumberdaya manusia, serta kelembagaan, Pengelola dari SPAM pedesaan sendiri merupakan unit yang dibentuk/ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengelola dan mengoperasional SPAM yang telah dibangun.

#### A. Analisis Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan (Mondy & Premeaux, 1995). Berarti didalam perencanaan ditentukan apa yang akan dicapai dengan membuat rencana dan cara-cara melakukan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. melalui perencanaan ini ditetapkan apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut.

Adapun tujuan yang mendasari bagaimana rencana program ini ditetapkan berdasarkan dari Direktorat pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan penjabaran dari visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019 yaitu "Terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Berdasarkan visi tersebut, lebih lanjut

dijabarkan tujuan Direktorat Pengembangan SPAM sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM;
- 2) Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan

Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam sebuah perencanaan ada dua elemen terpenting yang dikemukakan oleh Terry (2010: 9) sebagai bentuk mencapai sasaran dan rencana

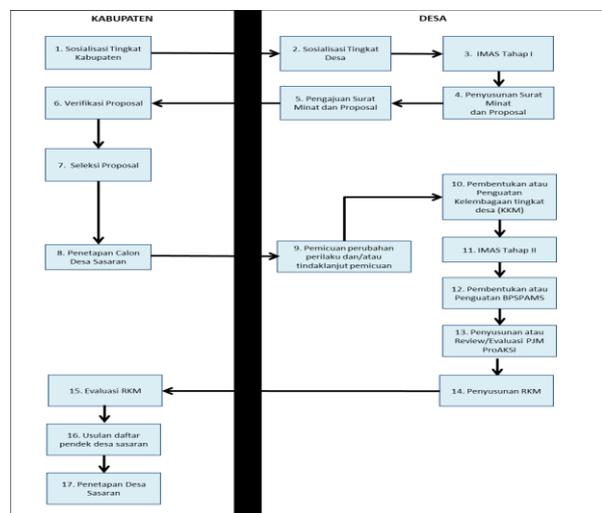
### 1. Rencana

Sasaran merupakan akhir yang harus dituju oleh setiap aktivitas. Sasaran dan tujuan itu tidak hanya melambangkan titik akhir dari perencanaan, tetapi tidak kearah mana pengorganisasian, pengisian lowongan, pemimpin, dan pengendalian telah ditujukan (Koontz, et all, 1991:126).

Masyarakat diberikan tanggungjawab penuh untuk merencanakan kegiatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil program dan mampu melakukan pengelolaan hasil program secara mandiri. Terlaksananya

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017. Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun perencanaan yang berlangsung secara berjenjang dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional.

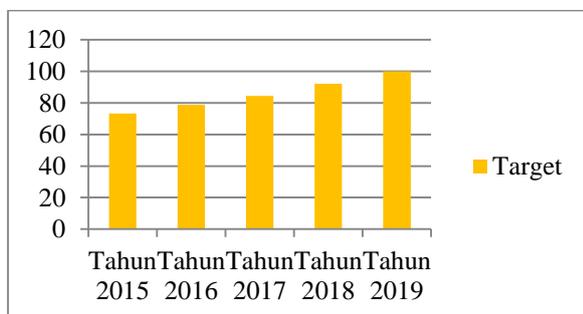
**Gambar 2. Tahap Perencanaan SPAM**



Sumber: Petunjuk teknis SPAM tingkat masyarakat, 2016

Pada tahapan perencanaan pengelolaan air bersih berbasis komunitas di Kelurahan Sungai Lekop atas keinginan bersama masyarakat melalui musyawarah, yang bersifat dari bawah keatas atau *bottom-up* berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan ditingkat Kelurahan kepada pemerintah daerah kabupaten Bintan.

**Gambar 3.** Sasaran Strategis Direktorat Pengembangan SPAM



Sumber: Olahan Data Peneliti, 2020

Dari data pada gambar 3. diatas menunjukan bahwa peningkatan untuk kebutuhan air minum bagi masyarakat meningkat dari tahun per tahunnya, begitu pula yang terjadi di Kabupaten Bintan.

Sesuai arahan RPJMN, dan Renstra Cipta Karya 2015-2019, Direktorat Pengembangan SPAM juga dituntut untuk mengembangkan infrastruktur di kawasan perdesaan. Pencapaian sasaran tersebut terjabarkan ke dalam pengembangan jaringan infrastruktur SPAM Kawasan Perdesaan sebagai penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik,

sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan.

## 2. Rencana

Rencana merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Untuk mencapai dari suatu rencana dalam pengelolaan air bersih berbasis komunitas di Kelurahan Sungai Lekop sudah diatur nya melalui pedoman pelaksanaan pengelolaan SPAM oleh kelompok masyarakat melalui Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 tahun 2018.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melaksanakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bahwa rencana Pembangunan SPAM di Kelurahan Sungai Lekop didasarkan dengan kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan SDM, serta kelembagaan. Dari rencana ini sebagai bentuk pemerintah mewujudkan serta pelayanan air minum yang berkualitas, dengan memenuhi prinsip dari segi kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan

Pada tahapan perencanaan ini peneliti menemukan bahwa kelayakan pembangunan masih belum sesuai dengan apa yang ada pada petunjuk teknis SPAM seperti halnya kondisi air

yang tidak jernih, sambungan yang macet serta kurang luasnya penambungan sumber air baku. Didalam target membuat suatu perencanaan tidak terlepas dari penganggaran Suatu rencana dapat memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan, tetapi dengan biaya yang terlalu tinggi tidaklah menjadikan efisiensi rencana. Sebenarnya konsep efisiensi itu mencakup rasio normal mengenai input menjadi output (Koontz et al., 1991:123).

a) Nilai partisipasi pada tahap perencanaan Jennifer-Mc Cracken-Deepa menyatakan, partisipasi merupakan proses dimana pihak-pihak yang terlibat mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan, keputusan dan sumber-sumber yang mempengaruhi mereka (dalam Yulianti, 2006: 43).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Sembel et al., 2017) mengatakan semakin tinggi peran serta partisipasi masyarakat desa/kelurahan tersebut maka semakin cepat pula pembangunan desa dapat terealisasi. artinya dimana partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan adanya proses keterlibatan masyarakat mengendalikan inisiatif pada pembangunan SPAM Bina Desa Kelurahan Sungai Lekop melalui bentuk partisipasi dalam bentuk uang atau benda. Partisipasi dalam bentuk uang atau benda ini merupakan bantuan dana yang dilakukan secara swadaya masyarakat

untuk mendukung program pembangunan SPAM di Kelurahan Sungai Lekop.

b) Nilai pemberdayaan pada tahap perencanaan

Menurut Sulistiyani (2004) yang menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berangkat dari persoalan kesulitan mendapatkan air bersih ketika musim kemarau melanda, potensi pemenuhan kebutuhan selalu diupayakan melalui program pemerintah daerah serta pihak Kelurahan Sungai Lekop itu sendiri memberikan bantuan melalui pihak-pihak yang dapat bekerja sama pada masalah ini. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti adanya nilai pemberdayaan pada perencanaan.

c) Nilai kepemilikan pada tahap perencanaan

Dari pembangunan sistem penyediaan air minum di Kelurahan Sungai Lekop dapat dikatakan jelas. Bahwa program tersebut dirancang pemerintah daerah dan diperuntukan untuk wilayah penerima manfaat. Pemerintah memberikan kewenangan terhadap masyarakat dalam mengelola sarana tersebut.

(Variesa & Waite, 2018) menyatakan bahwa nilai kepemilikan pada pengembangan komunitas mampu menciptakan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk masa mendatang mereka. Pada tahapan perencanaan, Dari hasil yang ditemukan dilapangan bahwa dalam perencanaan telah memiliki nilai kepemilikan.

Hal ini dapat dilihat dari seluruh komponen masyarakat mengetahui bahwa program tersebut akan dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

d) Nilai modal sosial pada tahap perencanaan

Modal sosial adalah derajat kohesi sosial yang ada dalam komunitas (Woolcock, 1998). Mengacu pada proses-proses antar orang yang membangun jejaring, norma-norma, dan *social trust*, dan memperlancar koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam proses perencanaan yang dilihat dari indikator modal sosial menggambarkan pihak pemerintah sebagai pihak koordinasi yang membangun jejaring sehingga masyarakat dapat terbangun kepercayaan dan saling menguntungkan satu sama lainnya.

Masyarakat bersikap kooperatif terhadap rencana pembangun SPAM di Kelurahan Sungai Lekop, hal ini dikarenakan pemerintah mampu membangun jejaring sosial yang baik, sehingga pemerintah mendapatkan persetujuan dari masyarakat di lingkungannya. Hal lainnya dikarenakan masyarakat setuju dengan program tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan pada tahapan

perencanaan sasaran dan rencana sudah dilakukan sebagaimana mestinya terdapat pengelolaan air bersih berbasis komunitas di Kelurahan Sungai Lekop terdapat nilai-nilai pengembangan komunitas dari nilai partisipasi, pemberdayaan, kepemilikan, dan modal sosial yang berjalan dengan lancar didalam perencanaannya.

## B. Analisis pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan Kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu koordinasi yang terpadu untuk mencapai tujuan kelompok merupakan organisasi. pengelompokan kegiatan-kegiatan serta penugasan kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya (Mondy & Premeaux, 1995). Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai satu tujuan secara efektif dan efisien.

Adapun tugas dan kewajiban dalam pengelolaan SPAM oleh kelompok masyarakat yang diatur melalui Peraturan Bupati no 1 tahun 2018 Yaitu.

- a) Melaksanakan pendataan jumlah pelanggan yang telah terpasang sambungan rumah;
- b) Melakukan penarikan tagihan penggunaan air pada pelanggan setiap bulan;
- c) Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan tagihan dari pelanggan;
- d) Melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan

prasarana SPAM seperti generator set (bahan bakar, oli, air radiator, selang-selang/pipa, komponen listrik, cylinder head, pompa minyak dan komponen kelistrikan), jaringan pipa, pompa intake, pompa distribusi, reservoir, meter air dan alat-alat pendukung lainnya;

- e) Mengoperasionalkan sistem instalasi pengelolaan air mulai dari generator, pompa intake, pompa distribusi dan instalasi pengolahan air;
- f) Membuat/mencatat operasi harian generator set dan pompa;
- g) Melaksanakan inventarisir atas kerusakan yang terjadi;
- h) Melaporkan kerusakan tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan melalui UPTD Air Minum paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kerusakan tersebut di inventarisir;
- i) Berkewajiban membuat Laporan Operasional dan Keuangan secara transparan dan akuntabel kepada DPUPR setiap bulannya dan ditembuskan kepada Camat/Lurah/Kepala Desa.

Setelah dilakukannya penelitian oleh peneliti dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi bahwa dalam pengelolaan air bersih di Kelurahan Sungai Lekop masih terdapat beberapa tugas yang belum

dilaksanakan oleh kelompok masyarakat sebagai pengelola yang menjalankan sistem penyediaan air minum.

Sejalan dengan pendapat dari (Terry, 1973) menyatakan pada tahap pengorganisasi pembentukan perilaku yang efektif hubungan antar orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan mendapatkan kepuasan pribadi dalam melakukan tugas yang dipilih di bawah diberikan kondisi lingkungan untuk tujuan mencapai beberapa tujuan atau objektif. Dari hasil penelitian (Sukarman, 2017) menyatakan bahwa sikap komitmen dan bertanggung jawab dari pengelola dengan adanya aturan atau sanksi yang jelas maka dalam pengelolaan program agar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

- a) Nilai partisipasi pada tahap pengorganisasian

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan, dan implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan (Adisasmita 2006: 41).

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang dari sumber informan. Dapat dilihat bahwa nilai partisipasi yang ada dalam tahap *organizing*

yaitu belum adanya pengambilan keputusan tentang kepengurusan dan keputusan penetapan tarif. Untuk penetapan tarif pemakaian air melalui sambungan rumah di Kelurahan Sungai masih terkendala, dikarenakan pelanggan tidak ada mendapatkan air bersih yang diperoleh dari SPAM itu sendiri.

Adapun langkah dalam penetapan tarif yang mana tercantum dalam peraturan Bupati No. 1 Tahun 2018 bahwa perhitungan tarif meliputi pada prinsip: Keterjangkauan dan keadilan; Mutu pelayanan; Pemulihan biaya; Efisiensi pemakaian air; Transparansi dan akuntabilitas; Perlindungan dan pelestarian air baku.

Keefektifan biaya merupakan teknik memilih alternatif-alternatif untuk mengidentifikasi pilihan yang disukai bila mana tujuan-tujuan kurang khas dibandingkan dengan yang dinyatakan oleh kuantitas yang jelas seperti penetapan biaya (Koontz et al., 1991: 230). Pada hal ini komunitas harus memiliki keberanian dalam pengambilan keputusan yang diambil agar keefektifan biaya akan menimbulkan output pada masyarakat itu sendiri.

b) Nilai pemberdayaan pada tahap pengorganisasian

Pemberdayaan pada pergerakan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh kelompok masyarakat. Masyarakat yang berdaya, memiliki

kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Nilai pemberdayaan belum mencapai yang diharapkan, kelemahan kemampuan pengelola dalam menjankan program ini menjadi salah satu akibat tidak optimal dalam pengelolaan air di Kelurahan Sungai Lekop dikarenakan tidak ada upaya pemeberian pelatihan ataupun pendampingan kepada pengelola

c) Nilai kepemilikan pada tahap pengorganisasian

Bahwa masyarakat belum mempedulikan keberlanjutan dari fasilitas yang sudah ada. Kesadaran terhadap pandangan untuk perubahan belum tercipta. Dalam hal ini, tujuan-tujuan program dapat membantu perkembangan kepercayaan diri dari kepemimpinan komunitas, meningkatkan kompetensi, dan mengurangi ketergantungan pada intervensi pemerintah, maupun lembaga-lembaga non pemerintah.

d) Nilai modal sosial pada tahap pengorganisasian

Upaya pada pengelolaan air bersih berbasis komunitas juga menilai dari modal sosial. Modal sosial sebenarnya muncul dari pemikiran bahwa

anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.

Modal sosial yang tinggi pada komunitas seharusnya mampu menciptakan kesadaran kritis akan sebuah perubahan pandangan bahwa kegiatan-kegiatan pengembangan komunitas itu adalah sebagai kekuatan untuk komunitas itu sendiri dan untuk masa depan mereka sehingga mereka bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilannya.

### C. Analisis Penggerakan

Menurut Sondang.P.Siagian (2007:95) penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis” Secara umum *actuating* diartikan sebagai menggerakkan orang lain.

Pada tahap penggerakan (*actuating*), pengelola ada beberapa point yang tidak mereka jalankan, seperti mengelola iuran masyarakat untuk operasi dan pemeliharaan, melakukan pencatatan administrasi keuangan dan kegiatan, dikarenakan pada SPAM Bina Desa Kelurahan Sungai Lekop belum memutuskan biaya yang harus dikelurkan dan terlihat tidak adanya laporan yang sampai pada pihak Kelurahan baik laporan administrasi keuangan maupun

kegiatan yang dilakukan setiap bulannya. Dengan hal itu pada pelaksanaan ini biaya operasional kegiatan masih bergantung kepada pihak UPTD air minum Dinas PUPR Kabupaten Bintan.

#### a) Nilai partisipasi pada tahap penggerakan (*actuating*)

Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. . Pada pengelolaan air bersih di Kelurahan Sungai Lekop sudah diberikan tugas, fungsi, dan perannya dalam mengelola fasilitas tersebut sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Pada tahapan *actuating* nilai partisipasi dilihat dari pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air bersih, yang difasilitasi oleh penyelenggara SPAM. Tingkat partisipasi pada tahap penggerakan ini dinilai cukup rendah antara lain belum adanya pembagian tugas setiap tugas yang sudah disepakati sehingga ada tidak adanya dorongan pekerjaan yang menjadi efektif.

#### b) Nilai pemberdayaan pada tahap penggerakan (*actuating*)

Konsep dalam penggerakan (*actuating*) ialah menggerakkan anggota untuk menjalankan tugas yang sudah ditetapkan dari hasil penelitian upaya yang dilakukan pihak kelurahan tidak

adanya pembinaan penyelenggaraan SPAM pedesaan ditingkat masyarakat baik pengelolaan administrasi maupun keuangannya.

Pada tahapan *actuating* nilai pemberdayaan menjadi hal yang sangat penting karena dalam pergerakan suatu komunitas sumber daya manusianya harus berperan secara aktif

c) Nilai kepemilikan pada tahap pergerakan (*actuating*)

Hal yang ingin dilihat dari nilai kepemilikan dalam tahapan *actuating* adalah kesadaran kritis. Kesadaran kritis yang dimaksud ialah ketika anggota komunitas mampu menggerakkan program tersebut untuk kedepannya. Pada tahap *actuating*, nilai kepemilikan yang dapat dilihat dari SPAM Bina desa Kelurahan Sungai Lekop anggota komunitas belum memiliki kesadaran kritis hal ini dikarenakan kelalaian anggota.

d) Nilai modal sosial pada tahap pergerakan (*actuating*)

Nilai modal sosial yang ingin dilihat pada tahap *actuating* ini adalah bagaimana seluruh anggota kelompok mampu bekerja saling membantu, menolong diri sendiri dan mampu memecahkan masalah. Pada SPAM Bina desa nilai modal sosial yang ada pada tahap *actuating* adalah anggota komunitas atau pengelola tidak bisa saling membantu

sehingga masalah yang ada tidak dapat terpecahkan.

Untuk potensi pemenuhan kebutuhan air masyarakat melalui SPAM yang ada belum bisa mengatasi sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat melalui sistem penyediaan air minum di Kelurahan Sungai Lekop, upaya diberikan dari pihak Kelurahan yaitu bekerja sama dengan instansi setempat untuk menangani ketika musim kemarau melanda, dengan memberikan bantuan distribusi air

Bahwa dalam proses *Actuating* (pergerakan) pada pengelolaan air bersih berbasis komunitas di Kelurahan Sungai Lekop. Kurangnya pergerakan yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan terhadap tugas dan fungsi yang diketahui oleh kelompok masyarakat akan sistem penyediaan air minum di wilayah mereka menjadikan kegiatan yang dilakukan tidak berjalan dengan semestinya.

Hambatan yang terjadi tidak adanya nilai partisipasi, nilai pemberdayaan, nilai kepemilikan, dan nilai modal sosial. Hal ini dikarenakan tidak adanya upaya pertemuan yang dilakukan, pelatihan dan koordinasi untuk memecahkan permasalahan sehingga penjalinan hubungan atau koordinasi dalam menggerakkan suatu organisasi atau kelompok menjadi tidak efisien.

#### **D. Analisis Pengawasan**

Dengan adanya pengawasan maka dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyalagunaan atau menghindari penyimpangan yang terjadi.

Menurut Situmorang dan Juhir (2001:22) maksud pengawasan adalah untuk :

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu *standard*

- a) Nilai partisipasi pada tahap penggerakan (*actuating*)

Nilai partisipasi pada tahap *controlling* yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan adanya pertanggungjawaban. Tujuan dengan dilakukannya pengawasan untuk meyakinkan

pengelolaa SPAM, agar kelompok bekerja dengan menjalankan tugas dan kewajiban dengan semestinya.

Nilai partisipasi pada tahap *controlling* terjadi pada SPAM Bina desa adalah kurangnya ketegasan pihak pengawas terhadap kelalaian-kelalaian pengelola dilapangan sehingga pengelola tidak melaporkan secara rinci laporannya kepada pengawas.

- b) Nilai pemberdayaan pada tahap penggerakan (*actuating*)

Nilai pemberdayaan yang dilihat pada tahap *controlling* yaitu bagaimana program tersebut mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dapat dilihat bahwa nilai pemberdayaan pada tahap *controlling* SPAM Bina Desa tidak berjalan dengan baik masyarakat yang seharusnya terpenuhi kebutuhan air bersihnya justru tidak merasakan manfaat dari SPAM tersebut.

- c) Nilai kepemilikan pada tahap penggerakan (*actuating*)

Pada nilai kepemilikan pada tahap *controlling* yang ingin dilihat adalah bagaimana seluruh komponen baik pengawas, pengelola, dan masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap program yang dibangun sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab atas keberadaan program tersebut.

bahwa nilai kepemilikan pada tahap *controlling* di SPAM Bina Desa kurangnya terjalannya koordinasi yang semestinya dibangun bersama pihak pemerintah desa yaitu pihak Kelurahan. Oleh karena itu informasi maupun kendala yang terjadi dilapangan tidak diketahui atasan selaku pihak yang memfasilitasi dan memberikan izin peran serta masyarakat di tingkat kelompok/komunitas diwilayahnya dalam pengelolaan SPAM Pedesaan.

d) Nilai modal sosial pada tahap penggerakan (*actuating*)

Nilai modal sosial pada tahap *controlling* yang ingin dilihat adalah ketika suatu program mencapai tujuannya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. sesuai dengan nilai pemberdayaan yang telah peneliti uraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat belum merasakan manfaat keberadaan SPAM di Kelurahan Sungai Lekop.

Pada SPAM Bina desa Kelurahan Sungai Lekop nilai modal sosial pada tahap *controlling* belum ada karena program tersebut belum mencapai tujuan yang diinginkan, dan tidak adanya inovasi pengembangan secara berkelanjutan.

Pada tahap *controlling* peneliti menarik kesimpulan bahwasannya dalam pengawasan yang dilakukan oleh dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bintan melalui UPTD air minum dan tim teknis yang ditunjuk dalam pengawasan yang dilakukan dinilai cukup lemah dengan tidak ada sanksi tegas yang dilakukan pihak kelurahan yang mana sebagai penanggung jawab pelaksanaan diwilayah penempatan untuk kelompok masyarakat sebagai pengelola dengan hal ini menjadikan bentuk pengelolaan tidak tertib dalam pengadministrasian, sehingga belum adanya menerima bentuk administrasi laporan pertanggungjawaban, teknis pelaksanaan perawatan, dan mekanisme mereka dalam penanganan sarana dan prasarana SPAM di Kelurahan Sungai Lekop.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan air berbasis komunitas di Kelurahan Sungai Lekop Kabupaten Bintan oleh kelompok masyarakat Bina Desa dalam pelaksanaan sejauh ini belum optimal.

Pengelolaan air dilakukan selama ini belum mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Diantaranya masih banyak menimbulkan permasalahan yang dihadapi sehingga komunitas yang bertanggung jawab dalam mengelola belum mampu berjalan secara mandiri dalam menyelenggarakan sistem penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat. sehingga masyarakat belum merasakan manfaat yang diharapkan, hal ini menjadi faktor penghambat yang dialami oleh

pengelolaan air berbasis komunitas di Kelurahan Sungai Lekop.

*Berbasis Masyarakat PAMSIMAS) di Temanggung*, Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

## REFERENSI

Amalia, K.R.(2019). *Evaluasi Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Jorong Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota*. Jurnal Talenta Sipil, Vol.2 No.1, Februari 2019 Halaman 1-7.

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aslamiyah, Suaibatul dkk.(2014). *Model Partnership Sebagai Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Air Bersih*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1

Batten, T.R. 1974. *The major issues and future direction of community development*. *Community Development Journal*, 9(2): 96–103.

Chaizi, Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo.

Chandler, R. C. & J. C Piano. (1998). *The Public Administration Dictionary*. Second Edition: Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc.

Crush, Jonathan. 1995. *Power of Development*. Routledge. New York.

Dunn, W.N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Inc.

Fukuyama, Francis. (2002). *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Terj Rusiani. Jogjakarta: Qalam

Insani, Safira. (2016). *Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi*

Kommarudin, (2001). *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi IX, Jakarta : Bumi Aksara.

Nasdian, Fredian Tonny. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Mahadiansar, Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020) Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>

Maryati, Sri (2018). *Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Hippiam Mandiri Arjowinangun, Kota Malang)*. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan. P-ISSN: 2338-1604 dan E-ISSN: 2407-8751 Volume 6 Nomor 2, Agustus 2018, 131-147.

Mondy. R. Wayne dan Premeaux, Shane R. (1995). *Management: Concepts, Practices, and Skills*. Massachusetts : Allyn and

Pasolong, Harbani. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Phillips, Rhonda dan Robert H. Pittman. (2008). *An Introduction to Community Development*. Taylor & Francis E-Library. New York

Prihatin, Rohani Budi. (2015). *Penyediaan Air Bersih di Indonesia: Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat*. Jakarta pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

- Putnam, R.D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster
- Qodriyatun, S. N. (2015). *Penyediaan Air Bersih Di Indonesia: Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Dan Masyarakat*. Jakarta pusat.P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Robinson, Jerry W dan Gary Paul Green. (2011). *Introduction to Community Development: Theory, Practice, and Service-Learning*. SAGE Publication Inc. USA.
- Santoso, A. H. M., Wahyono, B. (2017). *Manajemen Pelayanan Program*.VCT. HIGEIA, 2(2): 205- 215 (jurnal)
- Santono.(2010). *Air Bersih dan Sanitasi sebagai Kebijakan Sosial.Komunitas Indonesia untuk Demokrasi*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A.T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.Yogyakarta: Gaya Media
- Syahra, Rusydi. 2003. "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol 5 (1): 1-22
- Swanepoel, Henni dan Frik De Beer. 2006. *Community Development: Breaking The Cycle Of Poverty*. Fourth Edition.Juta and Co Ltd. Lansdowne, South Africa.
- Terry, George dan Leslie W. Rue.(2010). *Dasar-dasar manajemen*.Cetakan kesebelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Veriasa, Thomas dan Waite, Mashuri. (2018). *Konsep pengembangan masyarakat in Book: antara pengembangan komunitas, pemberdayaan dan partisipasi*. DO-10.13140.
- Vitriyana, Igadhini. (2018). *Manajemen Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat*.Higeia Journal Of Public Health Research&Development.<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>.diakses pada tanggal 19 januari 2019.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press
- Yefni, Haris. M. 2019. *Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat(Pamsimas) Desa Padang Mutung Kampar*. *Jurnal Masyarakat Madani* Vol. 4 No. 1. Juni 2019
- Yudiatmaja, W. E., Yudithia., Samnuzulsari, T., & Suyito. (2020). Social capital of local communities in the water resources management: an insight from Kepulauan Riau. *MS&E*, 771(1), 012067.
- Yudiatmaja, W. E. (2016) *Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal: Kritik terhadap Model Pembangunan Kapitalis*. *Jurnal Dialektika Publik*. 1(1), 100-113

## Dokumen

Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :18/Prt/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.